

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2008 DAN EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2007



**Disampaikan pada acara
Koordinasi Perencanaan Program Nasional Tahun 2008
Di Cikarang Bekasi**

TUGAS POKOK & FUNGSI

- TUGAS POKOK
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen
- F U N G S I
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan Was
 - b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

VISI dan MISI ITJEN

VISI

Terlaksananya pengawasan fungsional yang profesional untuk menjamin tercapainya target Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

VISI dan MISI ITJEN

MISI

- Meningkatkan kualitas aparatur
- Mengembangkan standar pengawasan
- Mengembangkan jejaring kerja & kemitraan
- Pembangunan Kesos yang bersih dan bebas KKN

KEBIJAKAN

- *Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan*
- *Peningkatan profesionalisme aparat WASNAL*
- *Peningkatan manajemen dan sistim informasi pengawasan*
- *Peningkatan koordinasi*
- *Mendorong Waskat dan Lakip*

STRATEGI

- Penetapan standar dan mekanisme wasnal
- Penetapan skala prioritas wasnal
- Pelaksanaan wasnal dilakukan secara reguler dan terprogram
- Peningkatan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil wasnal.

S a s a r a n

- ✓ Pelaksanaan seluruh tugas departemen
- ✓ Unit-unit pelaksana teknis
- ✓ Pelaksanaan dekonsentrasi & tugas pembantuan
- ✓ Badan/Lembaga/Yayasan/Orsos UKS
- ✓ Pengaduan/informasi masyarakat.
- ✓ PHLN
- ✓ Investigasi
- ✓ Alih Tugas / Jabatan
- ✓ Issue Strategis & Perintah Menteri

TUJUAN

- Pelaksanaan tugas dilakukan sesuai rencana, program, pedoman, kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembangunan Kesos yg tepat sasaran, efisien, efektif dan akuntabel

MEKANISME AUDIT TERHADAP PROGRAM / KEGIATAN YG DIDUKUNG DANA DEKON

- Pelaksanaan audit mengacu PKPT yg disepakati Itjen Dep, Bawasda seluruh propinsi & BPKP.
- Sebelum pelaks. Audit, Itjen Dep.menginformasikan kpd Gubernur, Bawasda, Dinsos provinsi, BPKP.
- Pelaksanaan audit diupayakan melalui audit terpadu
- Sebelum audit terpadu, didahului dengan bimtek
- Mekanisme & tata cara pelaksanaan audit tahun 2008 secara bertahap akan menyesuaikan dg mekanisme & prosedur pengelolaan APBN yg berbasis kinerja.
- Jika pelaksanaan audit menyimpang dari PKPT karena sesuatu hal, maka Itjen Dep. sebelumnya akan berkoordinasi dg Itjen Depdagri, Bawasda, Dinsos provinsi & BPKP
- LHA dikirim a.l kpd Gubernur, Bawasda & Dinsos Prov

POKOK-POKOK TEMUAN TAHUN 2007

A. Bidang Keuangan

1. Administrasi

- Kelengkapan dan pengerjaan buku tidak sesuai ketentuan
- Pengerjaan dan pengiriman LKKA/LKKP
- Pengawasan atasan langsung Bendaharawan
- Pembuatan bukti-bukti kas.

2. Pengembalian kerugian negara

- Adanya pengeluaran fiktif
- Kelebihan pembayaran/ketektoran kas
- Kemahalan harga/mark up
- Salah sasaran

3. Kewajiban penyetoran ke negara.

- Pungutan dan penyetoran PNBK
- Denda keterlambatan pekerjaan

B. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan barang dan jasa
 - HPS belum dibuat sesuai ketentuan/harga nyata
 - Spesifikasi teknis barang tidak lengkap
 - Berita acara serah terima barang tidak lengkap / tidak diserahkan ke satker
 - Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai kontrak
2. Administrasi BMN
 - BIB, KIB, DIR tidak dibuat/tidak lengkap
 - LMBT dan TL tidak dibuat
 - Penyerahan/pemanfaatan BMN : rumah dinas, kendaraan dinas, komputer, dst, tidak sesuai ketentuan

C. Bidang Kepegawaian/SDM

- Bendaharawan belum mengikuti Diklat Keuangan
- Penegakan disiplin belum sesuai aturan/sanksi PP.No.30 Tahun 1980.

D. Bidang Operasional

- Laporan pelaksanaan kegiatan belum dibuat.
- Rencana operasional tidak lengkap/tidak sesuai dengan pelaksanaan
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan
- Juknislak belum ada
- Dana sudah dipertanggung jawabkan tapi kegiatan belum dilaksanakan

Evaluasi Pelaksanaan Bangkesos (Berdasarkan Hasil Was dari Aspek SPM)

1. Aspek Organisasi

- a. Nomenklatur Dinas/instansi sosial masih bervariasi
- b. Struktur Organisasi dinas belum serasi dengan Peraturan Menteri No.82/2005
- c. Pendelegasian wewenang / tanggung jawab belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip organisasi
- d. Uraian tugas staf belum seluruhnya dibuat, disosialisasikan dan dilaksanakan
- e. Belum adanya koordinasi antar sektor terkait dengan adanya pengadaan dan penyerahan bantuan

→ temuan dekon 2007 : 2,78 %

2. Aspek Kebijakan

- a. Belum seluruh dinas / instansi sosial membuat kebijakan teknis pelaksanaan bengkesos sebagai acuan pelaksanaan program /kegiatan
- b. Penetapan Harga Satuan Daerah melebihi standar harga satuan Nasional
(Temuan Dekon 2007 : 14,44 %, UPT : 13,33 %

3. Aspek Perencanaan :

- a. Tidak didukung data PMKS yg jelas
- b. Tidak berdasarkan Need Assesment daerah
- c. Tidak didukung SDM yg proporsional
- d. Sarana prasarana kurang memadai
- e. Keterlambatan penetapan KPA dan PPK
(Temuan Dekon 2007 : 18,89%; UPT : 30,83 %)

4. Aspek Prosedur :

- a. SPM sebagai pedoman pelayanan belum ada
- b. Prosedur pengadaan barang dan jasa belum mengacu peraturan perundangan yang ada.
- c. Prosedur pelaksanaan seleksi belum optimal
- d. Penetapan sasaran dan target penerima pelayanan program. Kegiatan belum sesuai tahapan pelayanan.
- e. Penyusunan Standar Harga Satuan tidak didasarkan perhitungan yang realistis dan rasional

(Temuan Dekon 2007 : 24,44%; UPT : 41,66 %)

5. Aspek Pencatatan dan Pelaporan :

Perpres 8/2006 Pasal 48 ayat (2)

“Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pencatatan & pelaporan keuangan dan hasil kinerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

→ Masih terdapat dinas / UPT tidak menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi keuangan ke Itjen

(Temuan Dekon 2007 : 5,84%; UPT : 16,66 %)

6. Aspek Pembinaan Personil

- a. Rotasi dan mutasi pegawai relatif cepat
- b. Rekrutmen pegawai tidak sesuai latar belakang pendidikan dan profesi
- c. Pengembangan kapasitas pegawai kurang mendapat perhatian
- d. Jumlah pegawai tidak seimbang dengan beban tugasnya

(Temuan Dekon 2007 : 9,44%, UPT : 25,83 %)

7. Review Internal (Waskat)



Temuan Dekon 2007 : 18.33 % UPT : 16,66 %

SEBAB-SEBAB PENYIMPANGAN

A. Faktor Subyektif Manusia

- Kemampuan teknis & manajerial
- Mental / akhlak
- Kondisi Keluarga
- Kelalaian

B. Faktor Obyektif

- Standar salah
- Standar tidak jelas
- Standar tidak sesuai dg kondisi obyektif lapangan

C. Faktor Ekologis

- Kewenangan
- Was Lemah
- Sosial Budaya
- Force Majeur

REKAPITULASI TLHP DANA DEKON TH.2007 (ITJEN)

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp.	KEJ	Rp	KEJ	Rp	
1.	NAD	67	6.320.000	67	6.320.000	-	-	
2.	SUMUT	-	-	-	-	-	-	
3.	SUMBAR	-	-	-	-	-	-	
4.	SUMSEL	-	-	-	-	-	-	
5.	RIAU	-	-	-	-	-	-	
6.	JAMBI	-	-	-	-	-	-	
7.	BENGGULU	52	13.777.500	10	3.502.500	42	10.275.000	
8.	BABEL	125	32.327.464	6	14.457.464	119	17.870.000	
9.	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	
10.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	
11.	BANTEN	58	16.996.842	-	-	58	16.996.842	

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp.	KEJ	Rp	KEJ	Rp	
12.	JABAR	55	16.512.472	11	14.439.472	44	2.073.000	
13.	JATENG	-	-	-	-	-	-	
14.	JATIM	-	-	-	-	-	-	
15.	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	
16.	BALI	59	300.000	1	300.000	58	-	
17.	NTB	63	39.116.030	0	-	63	39.116.030	
18.	NTT	70	70.270.113	18	64.322.113	52	5.948.000	
19.	KALBAR	72	0	0	-	72	0	
20.	KALTIM	73	291.288.310	2	-	71	291.288.310	
21.	KALTENG	101	30.817.592	5	27.122.842	96	3.694.750	
22.	KALSEL	55	38.360.790	4	7.900.000	51	30.460.790	20

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp.	KEJ	Rp	KEJ	Rp	
23.	SULUT	62	2.484.000	1	2.484.000	61	-	
24.	SULTENG	66	285.451.606	2	1.385.787	64	284.065.819	
25.	SULSEL	41	6.780.000	1	6.780.000	40	-	
26.	SULTRA	-	-	-	-	-	-	
27.	GORONTALO	48	7.459.000	2	7.000.000	46	459.000	
28.	MALUKU	43	75.195.559	0	-	43	75.195.559	
29.	MALUKU UTARA	101	392.290.734	0	-	101	392.290.734	
30.	PAPUA	35	29.280.000	5	29.280.000	30	-	
31.	IRJABAR	128	43.037.750	10	43.037.750	118	-	
32.	SULBAR	-	-	-	-	-	-	
33.	KEPRI	-	-	-	-	-	-	
	J U M L A H	1.374	1.398.065.762	145	228.331.928	1.229	1.169.733.834	

REKAPITULASI TLHP UPT

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp.	KEJ	Rp.	KEJ	Rp.	
1.	STKS	9	3.292.000	9	3.292.000	0	0	
2.	BBRVBD CIBNG	14	39.830.581	1	2.500.000	13	37.330.581	
3.	BBPPKS LMBG	15	-	15	-	0	-	
4.	BBPPKS YGKRT	-	-	-	-	-	-	
5.	BBP3KS YGKRT	-	-	-	-	-	-	
6.	BBRSBD SOLO	18	2.017.390	18	2.017.390	0	-	
7.	BBRSBG TMGG	10	2.901.000	3	2.901.000	7	-	
8.	BBPPKS PDG	17	7.517.000	-	-	17	7.517.000,-	
9.	BBPPKS BJMSN	7	-	0	-	7	-	
10.	BBPPKS MKSR	-	-	-	-	-	-	
11.	BBPPKS IRJA	7	-	0	-	7	-	

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp	KEJ	Rp	KEJ	Rp	
12.	BPBI ABIYOSO	11	-	10	-	1	-	
13.	PSBN WG BDG	12	-	8	-	4	-	
14.	PSKW MULYAJAYA	-	-	-	-	-	-	
15.	PSBRW MELATI	-	-	-	-	-	-	
16.	PSMP HANDAYANI	-	-	-	-	-	-	
17.	PSBR BAMBU APUS	-	-	-	-	-	-	
18.	PSBG CIUNG WANARA BGR	8	-	7	-	1	-	
19.	PSPP GALIH PAKUAN BGR	12	698.250	10	698.250	2	-	
20.	PSBL PHALA MARTA SKBM	10	-	8	-	2	-	
21.	PSBK PANGUDI LUHUR BKS	14	7.122.125	12	7.122.125	2	-	
22.	PSBN TAN MIAT BKS	11	3.177.000	11	3.177.000	0	-	

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp	KEJ	Rp	KEJ	Rp	
23.	PSTW BUDI DHARMA BKSI	12	1.360.000	12	1.360.000	0	-	
24.	PSMP ANTASENA	10	-	0	-	10	-	
25.	PSPA Satria	12	9.900.000	1	9.900.000,-	11	-	
26.	PSAA TUNAS BANGSA PATI	10	-	0	-	10	-	
27.	PSBR RUMBAI RIAU	-	-	-	-	-	-	
28.	PSPP INSYAF	-	-	-	-	-	-	
29.	PSAA ALYATAMA	9	-	0	-	9	-	
30.	PSBL DHARMA GUNA	15	-	0	-	15	-	
31.	PRSD BUDI PERKASA PLG	-	-	-	-	-	-	
32.	PSBN MAHATMIYA	-	-	-	-	-	-	
33.	PSBL BUDI LUHUR BJRMSN	-	-	-	-	-	-	

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp	KE J	Rp	KEJ	Rp	
34.	PSBN TOU MO TOU MENADO	13	4.029.348	0	-	13	4.029.348	
35.	PSBG Nipotowe PALU	15	18.467.850	1	16.607.000	-	1.860.850 -	
36.	PSMP TUDOPOLI MKSR	15	9.370.040.	-	-	15	9.370.040	
37.	PSBD WIRAJAYA MKSR	17	1.996.000	-	-	17	1.996.000	
38.	PSTW GAU MABAJI SULSEL	5	-	-	-	5	-	
39.	PSMP Pharamitha MTRM	23	74.200	0	-	23	74.200	
40.	PSBR NAIBONAT KUPANG NTT	12	-	-	-	12	-	
41.	PSBRW EFATA KUPANG NTT	11	3.500.000	2	3.500.000	9	-	
42.	PSBLK Wasana Bahagia Ternate	12	-	-	-	12	-	
	J U M L A H	541	303.928.687	145	146.931.931	396	156.996.756	

REKAPITULASI TLHP KANTOR PUSAT TAHUN 2006

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp.	KEJ	Rp.	KEJ	Rp.	
1.	SETJEN	65	144.185.100	6	135.735.100	59	8.450.000	
2.	DITJEN DAYASOS	68	224.693.168,50	61	223.093.168	7	1.600.000	
3.	DITJEN YANREHSOS	82	690.463.741	12	679.451.798	70	11.011.943	
4.	DITJEN BANJAMSOS	0	0	0	-	-	-	
5.	BADAN DIKLIT KESOS	43	72.090.344	0	-	43	72.090.344	

REKAPITULASI TLHP DANA DEKON (BPKP)

NO	PROVINSI	TP		TPL		TPB		KET
		KEJ	Rp.	KEJ	Rp	KEJ	Rp	
1.	MALUKU	29	464.075.275	0	-	29	464.075.275	
2.	KALSEL	28	75.734.930	5	24.817.950	23	50.916.980	
3.	BALI	9	9.695.000	0	-	9	9.695.000	
4.	SULTENG	9	6.432.182	3	432.182	6	6.000.000	
5.	SULSEL	38	21.712.157	3	6.920.767	35	14.791.390	
	JUMLAH	113	577.649.544	11	32.170.899	102	545.478.645	

TERIMA KASIH